

**JURNAL**  
**DAMPAK YURIDIS DICABUTNYA HAK MONOPOLI PENYALURAN**  
**PUPUK BERSUBSIDI PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD)**  
**(Studi Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**NUR AFIFAH RAHMA DANIA**

NIM. 0910110058



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2013**

## ABSTRAK

NUR AFIFAH RAHMA DANIA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2013, *Dampak Yuridis Dicabutnya Hak Monopoli Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) (Studi Pada PUSKUD Jatim)*, Dr. Sihabudin SH. MH, Herman Suryokumoro SH. MS

Dalam penulisan ini, peneliti membahas apa dampak yuridis dicabutnya hak monopoli penyaluran pupuk bersubsidi pada Koperasi Unit Desa, selain itu hal-hal apa saja yang mempengaruhi dicabutnya hak monopoli ini, dan apa saja upaya yang dilakukan PUSKUD Jatim dalam mengatasiketerpurukan KUD Anggotanya setelah dicabutnya hak monopoli tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hal-hal yang mempengaruhi dicabutnya hak monopoli penyaluran pupuk dikarenakan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal karena keikutsertaan Indonesia dalam berbagai jenis perjanjian internasional dan meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut. Untuk faktor internal adalah karena keinginan Indonesia agar Koperasi dapat mengikuti perdagangan bebas dan bisa mengembangkan usahanya secara mandiri.

Berdasarkan penelitian diketahui pula mengenai dampak yuridis dari dicabutnya hak monopoli melalui Inpres 18 Tahun 1998 adalah adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dan dari keputusan tersebut maka kegiatan yang semula dijalani oleh KUD sebagai penyalur kini tidak dapat lagi dijalani, dan hanya sebatas pengecer saja.

Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan oleh PUSKUD Jatim untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai Koperasi Sekunder adalah dengan melakukan usaha Revitalisasi terhadap Koperasi-Koperasi yang pasif agar dapat melakukan kembali kegiatan perkoperasiannya. Selain itu, PUSKUD Jatim juga menjalin usahakemitraan dengan perusahaan-perusahaan lain demi menambah pendapatannya.

## ABSTRACT

NUR AFIFAH RAHMA DANIA, Department of Civil Law, Faculty of Law Brawijaya University, April 2013, *The Juridical Impact from Monopoly Rights Revocation of Subsidized Fertilizer Distribution on Koperasi Unit Desa (KUD) (Study on East Java PUSKUD)*. Advisors: Dr. Sihabudin SH. MH, Herman Suryokumoro SH. MS.

In this study, the researcher discusses about several points: (1) what kind of juridical impact from monopoly rights revocation of subsidized fertilizer distribution on Koperasi Unit Desa, (2) the factors that influence the revocation of this monopoly right, and (3) the effort done by the East Java PUSKUD to cope up with the members' deterioration after the monopoly right has been taken from them.

Based on the research findings, it is revealed that there are 2 factors that influence the revocation of the monopoly fertilizer distribution; internal and external factors. The external factor is due to the fact that Indonesia is participated in various kinds of international treaties and ratifies such agreements. Meanwhile, the internal factor is dealing with the desire of Indonesia to involve *Koperasi* in free trade world and able to expand its business independently.

Furthermore, based on research findings, it is known that there is juridical impact from the revocation of monopoly right through Presidential Decree no. 18 year of 1998 which stated that the presence of the Minister of Industry and Trade decision on No. 70/MPP/Kep/2/2003 about The Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer for Agriculture, and from that decision the activities that previously undertaken by *Koperasi* as a dealer, now, it can not longer be lived, but only limited as retailers.

Therefore, the efforts made by East Java PUSKUD to maintain its existence as a Secondary *Koperasi* is done by conducting revitalization effort towards *Koperasi* that are still passive in order to re-perform their activities. In addition, East Java PUSKUD also establishes business partnerships with other companies in order too increase its earnings.

## PENDAHULUAN

Hampir semua orang diseluruh dunia mengenal Koperasi. Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara bersama-sama. Pengertian Koperasi seperti yang disebutkan oleh Bung Hatta (1954) dalam Koperasi Indonesia menerangkan bahwa Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Pendapat lainnya yang juga mengemukakan tentang Koperasi bahwasannya Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (1993)<sup>1</sup>.

Prioritas pengembangan Koperasi dilakukan melalui KUD yang bergerak dalam bidang pertanian terutama pangan, yang berarti pula suatu kegiatan yang menyangkut daerah pedesaan, sehingga terbentuklah KUD yang untuk pertama kalinya pada tahun 1971 di Yogyakarta.

Sejarah pembangunan koperasi Indonesia mencatat betapa langkah-langkah strategis di bidang perkoperasian yang ditempuh pada tahap awal Orde Baru telah terbukti ampuh membantu mengatasi permasalahan pembangunan yang penting dan strategis, terutama di bidang pertanian. Salah satu di antara yang terpenting adalah keberhasilan program swasembada pangan terutama beras yang telah mengantarkan kita mencapai tahap swasembada beras sejak tahun 1984. Keberhasilan itu tidak lepas dari peran aktif KUD sebagai wadah ekonomi petani dan masyarakat pedesaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kenyataan menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Edilius dan Sudarsono dalam Revrisond Baswir, **Koperasi Indonesia**, BPFE, Yogyakarta, 2000 hal 2

KUD, dengan segala keterbatasannya pada saat itu, telah berani tampil di garis depan untuk mendukung dan mengamankan program nasional swasembada pangan dengan menanggung risiko yang sangat berat, yaitu apabila KUD gagal akan menimbulkan banyak kesengsaraan dalam kehidupan pertanian dan masyarakat perdesaan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berdampak pada masyarakatnya. Seperti halnya Inpres No. 18/1998 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 70/MPP/Kep/2/2003 juga berdampak pada KUD yang mana dulunya memonopoli penyaluran pupuk baik subsidi maupun non subsidi kepada para petani, yang setelah adanya Keputusan Menperindag tersebut tidak lagi menjadi satu-satunya penyalur pupuk tersebut. Dampak yang ditimbulkan inilah yang akan dijadikan bahan penelitian oleh penulis, karena dianggap menarik dan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kemajuan KUD.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Hal-hal yang mempengaruhi dicabutnya hak monopoli pada KUD dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi ?
2. Apa dampak yang ditimbulkan setelah dicabutnya hak monopoli pada KUD dalam hal penyaluran pupuk ? (Studi Pada PUSKUD Jatim)
3. Upaya apa saja yang dilakukan PUSKUD Jatim setelah adanya pencabutan hak monopoli pada KUD dalam hal penyaluran pupuk ? ( Studi Pada PUSKUD Jatim)

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian :**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang membahas bagaimana penerapan hukum yang berupa Keputusan Menperindag dalam masyarakat.

### **B. Pendekatan Penelitian :**

Jenis penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.<sup>2</sup> Metode pendekatan dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dampak Yuridis Dicabutnya Hak Monopoli Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Koperasi Unit Desa (KUD).

### **C. Jenis dan Sumber Data :**

#### **1. Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Yaitu data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

##### **b. Data Sekunder**

Yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.

#### **2. Sumber Data**

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 1998, hlm 124

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dan wawancara dengan nara sumber yang sudah ditunjuk oleh PUSKUD Jatim.
- b. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber yaitu literatur, studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, kamus hukum, maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain, dan internet sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

#### **D. Teknik Memperoleh Data :**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Data primer, yaitu diperoleh dari wawancara, yaitu cara yang ditempuh untuk memperoleh data atau informan dengan melakukan pertanyaan lisan kepada narasumber untuk mendapatkan data atau informasi sesuai dengan fokus penelitian.<sup>3</sup> Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan cara wawancara mendalam (*indepth interview*)
- b. Data sekunder diperoleh melalui *library research* (studi kepustakaan). Aktivitas ini merupakan tahapan yang sangat penting bahkan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan seluruh dari keseluruhan aktivitas penelitian.<sup>4</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data :**

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 114.



khususnya yang berhubungan dengan praktik yang terjadi secara faktual  
dilapangan terkait dengan permasalahan pada pokok bahasan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hal-Hal yang Mempengaruhi Dicabutnya Hak Monopoli Pada KUD dalam Hal Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

Koperasi dan pertanian tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dari awal dibentuknya Koperasi, sektor pertanian merupakan jenis usaha yang paling utama dan terus diawasi dan dikembangkan di setiap periodenya. Pada era pasar bebas sekitar tahun 1998-2001saati inilah puncak kejayaan KUD dan sekaligus menjadi masa keterpurukan KUD. Kebijakan pasar bebas mulai diberlakukan sejak 1 Desember 1998. Dengan kebijakan ini, pengadaan dan penyaluran pupuk tidak lagi berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur dan menjamin kesediaan pupuk yang dibutuhkan petani, dan pada tahun 1998 Indonesia dapat membuktikan di mata dunia sebagai Negara agraris dapat melakukan swasembada pangan. KUD pada masa itu sangat berjaya dengan segala fasilitas monopoli penyaluran pupuk yang diberikan pemerintah.

Kejayaan KUD tidak berlangsung lama. Pasca reformasi pemerintah menerbitkan INPRES Nomor : 18 Tahun 1998, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan Koperasi. Selain itu, pada instruksi kedua menyebutkan bahwa meningkatkan posisi Koperasi dalam kemitraan setara dengan badan usaha ekonomi lainnya untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional.<sup>5</sup> Dengan diberlakukannya Inpres Nomor 18 Tahun 1998 ini, KUD dianggap telah melakukan monopoli dalam melakukan kegiatan usahanya, dan sejak itu pula semua fasilitas yang dulu diberikan oleh Pemerintah kepada KUD secara bertahap dikurangi, sehingga dalam penegelolaannya Koperasi dituntut untuk bisa mandiri dalam mengelola usahanya.

---

<sup>5</sup> Instruksi Presiden Nomor : 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian

Pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ini semakin menegaskan posisi KUD yang semakin terpuruk. KUD Anggota PUSKUD Jatim pun juga merasakan. Banyak sekali KUD-KUD Anggota yang bisa dibilang mati suri karena pendapatannya sebagai penyalur pupuk sudah tidak lagi di monopoli dan harus dibagi dengan pihak swasta yang notabene memiliki jaringan usaha luas dan modal yang banyak. Sehingga dalam penjualannya, para pengusaha swasta dapat memberikan harga yang bersaing.

Pada akhirnya, Keputusan Menteri Perdagangan dengan salah satu pertimbangannya yaitu untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang terus diperbaharui hingga keluarlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-Dag/Per/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang isinya semakin membuat KUD Anggota PUSKUD Jatim. Didalam Permendag ini sama sekali tidak disebutkan posisi KUD sebagai penyalur, hanya saja pada pasal 8 disebutkan “Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk Bersubsidi Produsen menunjuk usaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum sebagai Distributor dengan wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa tertentu berdasarkan SPJB.”<sup>6</sup>

Apabila dilihat dari perkembangan Koperasi di atas, penulis membagi menjadi 2 bagian tentang hal-hal yang mempengaruhi dicabutnya hak monopoli penyaluran pupuk bersubsidi pada KUD, yaitu karena faktor Eksternal dan faktor Internal.

### **1. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Dicabutnya Hak Monopoli Penyaluran Pupuk Pada KUD**

---

<sup>6</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-Dag/Per/6/2011

Pengaruhnya karena Indonesia mengikuti berbagai jenis perjanjian-perjanjian ditingkat Internasional seperti maupun ditingkat ASEAN yang bergerak dibidang ekonomi, social, budaya, dan pertanian, maupun organisasi-organisasi Koperasi ditingkat Internasional dan ASEAN. Perjanjian-perjanjian tersebut berbasis liberalis dimana pasar bebas menjadi tujuan utamanya, dan Koperasi dapat menjadi salah satu badan usaha yang dapat mengikuti dan masuk kedalam pasar dunia tersebut.

*International Cooperative Alliance (ICA)*

*Asean Cooperative Organization (ACO)*

## **2. Faktor Internal yang Mempengaruhi Dicaputnya Hak Monopoli Penyaluran Pupuk Pada KUD**

Seiring dengan perkembangan pasar bebas, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/MPP/Kep/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang menempatkan KUD hanya sebagai pengecer saja karena persyaratan untuk menjadi distributor sangat sulit dan membutuhkan banyak modal.

Semakin kearah dewasa, KUD semakin terpuruk keberadaannya karena tidak dapat lagi bersaing dengan badan usaha lainnya yang bermain di pasar persaingan bebas. Keinginan Pemerintah untuk memajukan Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang ikut dalam pasar bebas, bisa jadi akan menjadi sebuah boomerang yang nantinya akan membunuh Koperasi itu sendiri.

## **3. Adanya Pengecualian Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Semua jenis perjanjian internasional selalu memberikan kedaulatan kepada negara anggotanya untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional namun tetap disesuaikan dengan norma hukum dan budaya yang berlaku di negaranya. Indonesia yang merupakan negara agraris dimana pendapatan utama dari sektor pertanian dan untuk mensukseskan ketahanan pangan tersebut di dukung melalui program-program yang terorganisir melalui Koperasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebenarnya telah mengecualikan Koperasi sebagai badan usaha yang tidak dikenakan pasal-pasal pada undang-undang ini. Namun, Menteri Perindustrian dan Perdagangan tidak sepaham dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan tetap mencabut hak monopoli penyaluran pupuk dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan peneydiaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu, jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Yang kesemuanya dapat dipenuhi oleh pihak swasta sehingga KUD-KUD hanya bertahan pada posisi pengecer saja.

Apabila maksud dan tujuan tersebut dianggap baik, dalam prakteknya hal tersebut malah menjadikan banyak sekali KUD yang gulung tikar karena seluruh fasilitas yang diberikan pemerintah juga ikut dicabut dengan diberlakukannya peraturan tersebut. Ini semakin membuktikan, bahwasannya pemerintah hanya ikut mengikuti perkembangan pasar dunia namun tidak dibarengi dengan fasilitas guna mendukung tujuan negara.

Meski Indonesia telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional, namun sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tetap mempunyai hak secara mandiri untuk memutuskan keikutsertaan dengan perjanjian internasional yang etlah dibuat atau yang Indonesia terikat, setelah secara internal mempertimbangkan keuntungan maupun kerugiannya baik untuk tetap terikat maupun ketika tidak terikat dengan perjanjian internasioanl tersebut.

## **Dampak yang Ditimbulkan Setelah Dicabutnya Hak Monopoli Pada KUD Dalam Hal Penyaluran Pupuk**

Telah disebutkan di atas bahwa dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya peraturan atau keputusan. Sebenarnya sangat ironi apabila diingatkan kembali, pada masa KUD Berjaya dengan semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu demi keberlangsungan hidup KUD yang kemudian secara cepat ditarik kembali semua fasilitas tersebut hingga banyak sekali KUD Anggota yang mati suri akibat tidak dapat bertahan dengan persaingan pasar.

*Dampak Yuridis perubahan Status KUD yang dulunya sebagai penyalur tunggal sekarang hanya menjadi pengecer*

Dampak yuridis adalah dampak hukum yang timbul akibat adanya peraturan baru. Di sini, bentuk dari dampak yuridis dari Inpres 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian dimana di dalamnya mengatur tentang :

### **PERTAMA**

Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah :

- a. Meningkatkan dan mendorong semangat berswadaya dan berswakarsa dalam berkoperasi di kalangan masyarakat disertai dengan pemberian kemudahan dalam mendirikan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya;
- b. Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas dan peran serta yang aktif dari anggotanya agar koperasi mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh dan mandiri;
- c. Memantapkan perluasan basis usaha koperasi dan meningkatkan mutu kewirausahaan serta profesionalisme sumber daya manusia koperasi agar mampu menjadi bangun usaha utama dan sokoguru perekonomian nasional yang berakar dalam masyarakat.

### **KEDUA :**

Para Menteri sebagaimana tersebut Nomor 2 sampai Nomor 13, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Urusan Logistik dan para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan kewenangan sektor masing-masing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk :

- a. Meningkatkan peran koperasi dalam semua kegiatan ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian;
- b. Memperluas pangsa, dan memperkuat peran koperasi dalam kegiatan produksi dan distribusi nasional untuk menjamin perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha;
- c. Meningkatkan posisi koperasi dalam kemitraan setara dengan badan usaha ekonomi lainnya untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional, pemerataan pembangunan dan memperkokoh persatuan-kesatuan bangsa.

Menyetarakan Koperasi dengan badan usaha lainnya menjadikan pihak swasta juga ikut dalam lalu lintas penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani, yang juga berdampak terhadap kelangsungan hidup Koperasi itu sendiri, yang akhirnya pada tahun 2003 keluarlah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang semakin memperjelas posisi Koperasi/KUD dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan tidak memasukkan Koperasi/KUD dalam pembagian Lini Penyaluran pupuk. disana disebutkan bahwa pola penyaluran pupuk bersubsidi terbagi atas :

1. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor
2. Lini II adalah lokasi gudang di wilayah ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan
3. Lini III Lokasi gudang distributor pupuk dan atau Produsen di wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen
4. Lini IV adalah Lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.

Dari Norma tersebut, maka kegiatan penyaluran pupuk yang semula di monopoli oleh pihak KUD tidak lagi dilaksanakan. Di sini Koperasi/KUD hanya diposisikan sebagai pengecer saja dan hanya sebagian kecil saja KUD Anggota PUSKUD Jatim yang bisa menjadi KUD Distributor dan bersaing dengan pihak Distributor Swasta.

Dampak Yuridis ini dirasa sangat mendukung hancurnya Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang ikut menopang ketahanan pangan nasional. Perubahan peraturan yang diikuti dengan perubahan penetapan penyaluran pupuk bersubsidi melalui lini-lini yang semakin diperbaharui semakin menyudutkan posisi KUD. Pada lampiran III Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 70/MPP/Kep/2/2003 diatur mengenai persyaratan penunjukan sebagai distributor adalah sebagai berikut :

- (1) Berbentuk Badan Hukum
- (2) Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum
- (3) Berpengalaman sebagai distributor pupuk minimal 2 musim tanam dan telah menunjukkan kinerja distribusi yang baik sesuai dengan penilaian Produsen
- (4) Memiliki pengurus yang aktif menjalankan roda organisasi
- (5) Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (6) Memiliki atau menguasai sarana untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan yang menjadi tanggung jawabnya
- (7) Mempunyai jaminan distribusi di wilayah kerja yang ditetapkan oleh produsen minimal 1 (satu) pengecer di setiap Kecamatan
- (8) Memiliki permodalan yang dapat dipercaya dan disepakati oleh produsen
- (9) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh produsen.



Pada KUD Anggota PUSKUD Jatim saja, dari 702 KUD hanya 16 KUD saja yang mampu menjadi KUD Distributor. Perbandingan yang sangat jauh antara jumlah KUD Anggota dan KUD Distributor ini menjadi salah satu bukti bahwasannya hanya sebagian kecil saja KUD yang mampu bersaing dengan pihak swasta.

*Kalahnya KUD dalam persaingan pasar dengan pihak Distributor Swasta yang mengakibatkan PUSKUD Jatim kehilangan pendapatan utamanya*

Hubungan PUSKUD Jatim dan KUD pasca keluarnya Inpres 18 Tahun 1998 menjadi tertatih. Banyak sekali KUD Anggota yang mati Suri yang menjalankan roda organisai dan usahanya. Dari Jumlah Anggota 702, sebanyak 148 KUD Anggota yang pasif, 153 KUD sehat, dan sisanya bisa dikatakan menjalankan aktifitas organisasi namun kondisi pendapatannya tidak lebih dari 100 juta rupiah. Data Terlampir.

*Penyusutan fasilitas dari pemerintah yang berupa kredit dana untuk pangan, pupuk dan, bibit*

Penyusutan fasilitas berupa Kredit Dana dari pemerintah adalah hal terberat yang paling dirasakan oleh pihak PUSKUD Jatim. Karena, sudah tidak ada lagi dana talangan yang bisa diandalkan apabila suatu waktu PUSKUD Jatim mengalami kekurangan dana. Sebenarnya, penyusutan fasilitas ini merupakan salah satu dampak dari dicabutnya hak monopoli penyaluran pupuk. Setelah dicabutnya hak tersebut, banyak KUD Anggota yang mengalami mati suri, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap PUSKUD Jatim atas kinerjanya dalam menaungi para Anggotanya.

**Upaya yang Dilakukan PUSKUD Jatim Setelah Adanya Pencabutan Hak Monopli Pada KUD Dalam Hal Penyaluran Pupuk**

Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan, PUSKUD Jatim mengusulkan rencana Revitalisasi untuk KUD-KUD Anggota yang pasif kepada pemerintah untuk diaktifkan kembali dengan mengucurkan dana sebagai pendukung bangkitnya KUD-KUD tersebut. Dan rencana ini disambut baik oleh pemerintah dan dalam waktu dekat dapat diwujudkan.

Setelah semua periode yang dilalui oleh PUSKUD Jatim, baik melalui masa kejayaannya dan keterpurukannya membuat PUSKUD Jatim memikirkan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan ekistensinya. Banyak sekali jenis-jenis usaha baru yang ditumbuhkan oleh PUSKUD Jatim, yang disebar di seluruh wilayah Jawa Timur yang langsung di tangani dan dijalankan oleh KUD Anggota. Jenis-Jenis tersebut adalah :

a) Usaha Sendiri

1. Perdagangan pupuk
2. Usaha penggilingan beras
3. Usaha simpan pinjam
4. Usaha pergudangan
5. Usaha RS. Surabaya Medical Service
6. Usaha pembayaran listrik
7. Usaha jasa penididkan LP3I

b) Usaha Kemitraan

1. PT. Warahma Biki Makmur (MPS), Tuban
2. PT. Dadi Mulyo Sejati (MPS), Ngawi
3. PT. BPR Arta Mulya Bumi Mukti, Sidoarjo
4. PT. BPR Rukun Karya Sari, Lamongan
5. PT. Puskudelta Baja Prima (Perbengkelan), Malang
6. PT. Samodra Omega Jaya Makmur (Pakan Ternak), Probolinggo
7. MPS KUD Tani Mulyo PUSKUD, Lamongan

c) Usaha Rintisan

1. Distributor-agen elpiji

## 2. PT. POS Indonesia

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hal-hal yang mempengaruhi dicabutnya hak monopoli pada KUD dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi terbagi atas 2 faktor, yaitu factor factor eksternal dan factor internal. Dari factor eksternal, pengaruhnya karena Indonesia mengikuti berbagai jenis perjanjian-perjanjian ditingkat Internasional seperti maupun ditingkat ASEAN yang bergerak dibidang ekonomi, social, budaya, dan pertanian, maupun organisasi-organisasi Koperasi ditingkat Internasional dan ASEAN. Perjanjian-perjanjian tersebut berbasis liberalis dimana pasar bebas menjadi tujuan utamanya, dan Koperasi dapat menjadi salah satu badan usaha yang dapat mengikuti dan masuk kedalam pasar dunia tersebut.

Sementara untuk factor Internalnya, Indonesia telah meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut, dan juga membuat peraturan-peraturan yang secara perlahan-lahan menuntut Koperasi Indonesia dapat hidup, berkembang secara mandiri dan ikut dalam pasar bebas dunia.

Namun hal ini dirasa kurang sesuai dengan budaya dan norma hukum yang berlaku dan sedikit banyak mulai lepas dari prinsip dan tujuan dari Koperasi yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil. Dan dianggap, Negara tidak melindungi hak-hak masyarakat kecil tersebut.

2. Dampak yang ditimbulkan setelah dicabutnya hak monopoli pada KUD dalam hal penyaluran pupuk setelah melakukan Studi Pada PUSKUD Jatim, adalah :
  - a) Dampak Yuridis perubahan Status KUD yang dulunya sebagai penyalur tunggal sekarang hanya menjadi penegecer;

- b) Kalahnya KUD dalam persaingan pasar dengan pihak Distributor Swasta yang mengakibatkan PUSKUD Jatim kehilangan pendapatan utamanya
  - c) Penyusutan fasilitas dari pemerintah yang berupa kredit dana untuk pangan, pupuk dan, bibit
3. Upaya yang dilakukan PUSKUD Jatim setelah adanya pencabutan hak monopoli pada KUD dalam hal penyaluran pupuk dengan melakukan Studi Pada PUSKUD Jatim adalah, banyak sekali jenis-jenis usaha baru yang ditumbuhkan oleh PUSKUD Jatim, yang disebar di seluruh wilayah Jawa Timur yang langsung di tangani dan dijalankan oleh KUD Anggota. Jenis-Jenis tersebut adalah :
- a. Usaha Sendiri
  - b. Usaha Kemitraan
  - c. Usaha Rintisan

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian dengan melakukan studi pada PUSKUD Jatim adalah :

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kemajuan dan kelangsungan hidup Koperasi Indonesia, karena Koperasi adalah wadah aspirasi masyarakat kecil yang memiliki modal pas-pasan. Apabila pemerintah menginginkan Koperasi ikut dalam pasar bebas, seharusnya diberikan tambahan modal maupun tambahan wawasan mengenai pasar bebas itu sendiri sehingga Koperasi dapat mampu masuk ke dalam pasar bebas tersebut dan bersaing seperti badan-badan usaha lainnya.
2. Masyarakat diharapkan dapat membantu terwujudnya cita-cita pemerintah dan Koperasi dengan ikut berperan aktif dalam memajukan Koperasi yang diikutinya dan membuka wawasan seluas-luasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fahmi Lubis, dkk, **Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, KPPU, 2010
- Arifinal Chaniago, **Perkoperasian Indonesia**, Angakasa, Bandung, 1984
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 1998
- Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, **Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Pariaman Sinaga Dkk, **Koperasi Dalam Sorotan Peneliti**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Revrison Baswir, **Koperasi Indonesia**, BPFE, Yogyakarta, 2000
- Romy Hanitijo S, **Metode Penelitian Hukum & Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998
- Sri Edi Swasono, **Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neo Liberalisme**, yayasan Hatta, Jakarta, 2010
- Sri Woelan Azis, **Aspek-Aspek Hukum KUD Dalam Gerakan Pelaksanaannya**, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
- Sudarsono dan Edilius, **Koperasi Dalam Teori & Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sutrisno, **Buku Ajar Koperasi Indonesia (Organisasi yang Spesifik dan Kebijakan Pengembangan)**, Universitas Negeri Malang Jurusan Manajemen, 2009

Wiwik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 378/MPP/Kep/8/1998 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk untuk sektor Pertanian

Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

### **Internet**

<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/FAE22-1-05.pdf>

<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/ART-27.pdf>